



Pasien Kritis Jadi Prioritas Utama

Reaktivasi 21.000 Peserta PBI BPJS Terus Bergulir di Kota Yoga

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah memacu reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 21.000 warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Hingga kini, ribuan warga mulai memadati posko pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) demi mengahlikan kepesertaan ke skema PBI APBD.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono, mengungkapkan bahwa per data terbaru, tercatat 4.261 warga telah berhasil melakukan reaktivasi. Meski masih terdapat sisa sekitar 16.000 jiwa yang status kepesertaannya belum aktif kembali, Dinkes terus menambah kuota pelayanan harian untuk mengejar ketertinggalan.

"Kemarın sore itu totalnya 4.261. Hari ini 300 untuk kuota (di MPP), ditambah dari jalur lain sekitar 150-an melalui Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp. Sampai hari ini kuota saya tambah," ujar Waryono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (11/2).

Waryono menegaskan bahwa fokus utama saat ini diberikan kepada warga yang membutuhkan penanganan medis mendesak dan rutin. Layanan prioritas secara khusus diarahkan bagi pasien ga-

BERPACU WAKTU

- Pemerintah Kota Yogyakarta tengah memacu reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 21.000 warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
- Fokus utama saat ini diberikan kepada warga yang membutuhkan penanganan medis mendesak dan rutin.
- Kendala utama reaktivasi terletak pada proses input administrasi, mengingat banyak warga belum memiliki dokumen digital.

gal ginjal yang harus menjalani hemodialisis (cuci darah), pasien kemoterapi, serta pasien yang sudah terjadwal untuk tindakan operasi.

"Jadi, kadang yang sekarang ini untuk jadwal besok pagi, dia sekarang harus dapat jaminan, harus diaktifkan," tambah Waryono.

Dinkes memastikan proses aktivasi secara teknis di tingkat BPJS hanya memakan waktu sekitar satu jam setelah data diinput. Namun, kendala utama di lapangan justru terletak pada proses input administrasi, mengingat banyak warga belum memiliki dokumen digital.

Untuk meminimalkan antrean di MPP, masya-

rakat diimbau memanfaatkan layanan daring melalui aplikasi JSS atau WhatsApp. Layanan ini juga bersifat inklusif, di mana lansia atau pasien yang sakit tidak perlu datang langsung, bisa diwakilkan anak atau pengurus kampung.

Menanggapi adanya wacana terkait reaktivasi otomatis bagi seluruh PBI dalam waktu tiga bulan, Waryono menegaskan bahwa secara teknis di lapangan, warga tetap harus menem-puh mekanisme pengajuan agar status kepesertaannya valid dan terjamin oleh anggaran daerah.

"Ya itu kan statement politik. Kalau saya kan teknis, teknis saya itu ya apa adanya di depan kita bagi masyarakat. Yang bisa mengaktifkan kan BPJS dengan teknis yang ada di kita. Kalau itu [otomatis] kan kebijakan, mekanismenya kan belum disepakati juga," tegasnya.

Untuk mendukung langkah reaktivasi ini, Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp32 miliar pada APBD 2026. Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,6 miliar guna memastikan seluruh warga terdampak dapat ter-cover hingga akhir tahun.

Batasan

Wall Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menilai, langkah rekonstruksi data yang dilakukan Kementerian Sosial merupakan upaya untuk memastikan

bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, selama ini ada kecenderungan daerah terjebak dalam nafsu mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) demi sebuah prestasi. Dampaknya, banyak warga yang sejatinya kurang layak menerima bantuan iuran dipaksakan masuk kepesertaan, dan memicu pembengkakan anggaran atau *over budget*.

Hasto berharap pemerintah pusat memiliki ketegasan dalam menentukan batasan atau *cut-off point* berdasarkan Data Tunjangan Sosial Ekonomi (DTSEN). Meski demikian, mantan Kepala BKKBN tersebut meminta kelonggaran, agar pemerintah daerah tetap bisa memberikan suplemen, atau pendampingan bagi warga yang benar-benar membutuhkan namun tidak masuk dalam kuota PBI pusat.

"Kalau kami di Kota Yogyakarta, menyikapinya dengan meng-cover melalui Jamkesda. Tapi skemanya tidak melalui iuran rutin, melainkan *fee for service* atau *case by case*. Jadi, kalau ada kasus (sakit), baru kita bayar," jelasnya.

Skema ini disiapkan untuk menjangkau warga yang berada di desil menengah namun mendadak mengalami kesulitan finansial akibat penyakit berat. Hasto mencontohkan, warga di desil 6 atau 7 sekalipun berpotensi akan goyah ekonominya jika harus menjalani cuci darah rutin dua kali seminggu. **(han/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005